

# **PUBLIKASI ILMIAH**

## **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.” (Studi Kasus di Kota Pontianak)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Ujian Tesis



**DIAJUKAN OLEH**

**Sri Sulasmini, SH**  
**NIM. A21212072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PONTIANAK  
2015**

## **PUBLIKASI ILMIAH**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.” (Studi Kasus di Kota Pontianak)**

**Oleh:**

**Sri Sulasmini, SH  
NPM. A21212072**

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum**

**Pembimbing II**

**Hj. Herlina, SH., MH..**

## **ABSTRACT**

*This thesis research raised the issue of law enforcement with the research title, TO THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT EIA. "(Case Study in Pontianak) This study uses a socio-juridical implementation of the EIA study. Enforcement of environmental law in Indonesia is regulated in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Management. This Act provides three kinds of aspects of environmental law enforcement is law enforcement administrative, civil and criminal. One of the law enforcement environment with administrative aspects is through the concept of EIA as provided for in Article 16 UULH and procedures laksananya by Government Regulation Number 27 of 1999. Environmental impact assessment is one way of effective control. EIA is essentially a refinement of a development project planning process. Negative impacts caused by development projects often can be minimized by EIA. Efforts to do to achieve this is to make environmentally sound development, the environment considered since it is planned to start construction of the building operations.*

*‘ Environmentally sound development has been duly considered by the nation further. One of the key green development is that we often hear although not much we understand, the EIA (Environmental Impact Assessment). EIA invites people to take into account the risk of its activities on the environment. Preparation of EIA is based on an understanding of how nature is organized, connected and functioning. Things to note also is the interaction between social forces, technological and economical with the environment and natural resources. This understanding allows for predictions about the consequences of development. EIA is a study of the impact of a planned activity on the environment, which is necessary for the decision-making process. EIA has a purpose as a tool for planning preventive measures against environmental damage that may be caused by a development activity is being planned. Current protection and Environmental Management (PPLH) according to Law Number 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment Article 1 paragraph (2) is a systematic and integrated efforts are being made to preserve the function of the environment and prevent pollution and / or damage to the environment which includes planning, utilization, control, maintenance, monitoring, and enforcement.*

*This Act. Why made this law? Because currently all human activity to raise the living standards are often irresponsible and destructive nature. So Shrimp Act was created as a*

*government action to prevent the further degradation of the environment and to manage the environment for the better. In this Act clearly stated in Chapter X Section 3 of Article 69 on the prohibition in the protection and management of the environment which includes a ban on pollution, hazardous and toxic inserting objects (B3), inserting waste into the environment, land clearing by burning, and so forth. For the government to have the authority to conduct an environmental audit are listed in section 48 and subsection 49 (1). In addition to Article 63, pemerintah area has the duty and the authority to implement pollution control or environmental damage, but how environmental crime enforcement of the implementation of the EIA?*

**Keywords: Law Enforcement, Environment, EIA, Environmental Criminal**

## **ABSTRAK**

Penelitian Tesis ini mengangkat masalah penegakan hukum dengan judul penelitian, **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.” (Studi Kasus di Kota Pontianak)** Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis pelaksanaan AMDAL. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Salah satu upaya penegakan hukum lingkungan dengan aspek administrasi adalah melalui konsep AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH dan tata laksananya oleh PP No 27 Tahun 1999.

Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut oleh bangsa ini. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan adalah yang sering kita dengar meski belum jauh kita pahami, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL mengajak manusia untuk memperhitungkan resiko dari aktifitasnya terhadap lingkungan. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman bagaimana alam ini tersusun, berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatan-kekuatan sosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Pemahaman ini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi tentang pembangunan.

AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Saat ini perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang ini. Mengapa dibuat Undang-Undang ini? Karena saat ini segala aktivitas manusia untuk meningkatkan taraf hidup seringkali tidak bertanggung jawab dan merusak alam. Maka Undang-Undang ini dibuat

sebagai tindakan pemerintah untuk mencegah semakin rusaknya lingkungan dan untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Untuk Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan audit lingkungan hidup yang tercantum pada pasal 48 dan 49 ayat (1). Selain itu pada pasal 63, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, namun bagaimana penegakan hukum tindak pidana lingkungan terhadap pelaksanaan AMDAL?

***Kata Kunci:*** *Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, AMDAL, Tindak Pidana Lingkungan Hidup*

## A.Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu diadakan suatu cara, pola dan kebijaksanaan pembangunan yang dipahami bersama, bahwa: (1) Minimal tidak mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) dari ekosistem, dan maksimal turut membina ekosistem yang lebih stabil dan dinamis. (2) Membina ekosistem yang beragam.

Kewajiban hukum bagi semua pihak untuk memelihara dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang sebagai konsekwensi penguasaan lingkungan yang dimiliki terhadap lingkungan, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Munculnya persoalan lingkungan hidup, dikarenakan dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pembangunan itu meliputi segala bidang termasuk bidang industri yang dipandang sangat potensial merusak lingkungan hidup.

Lahirnya konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan reaksi terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. AMDAL dimaksudkan untuk terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana melalui pencegahan dan atau pengendalian dampak negatif seraya mengembangkan dan meningkatkan dampak positif pembangunan.

Meskipun demikian besar peran AMDAL bagi pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi ada sekelompok orang yang masih terlintas kesan seolah-olah AMDAL menghambat kelancaran pembangunan. AMDAL bukanlah suatu hal yang perlu dihindari, tetapi merupakan hal yang harus dilaksanakan, sehingga suatu proyek pembangunan akan memenuhi syarat kelayakan aspek teknologi, ekonomi – finansial dan lingkungan. Keinginan untuk berpartisipasi dalam memasyarakatkan AMDAL serta pembinaan kesadaran hukum terhadap lingkungan dan ditinjau dari berbagai aspek hukumnya.

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a) Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c) Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.
- e) Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Unsur penting bagi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup di mana pun berada. Manusia dengan lingkungannya senantiasa terjadi interaksi yang aktif dan kontinu. Dia mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Pramudya Sunu, *Ibid*, hal 22.

sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sehingga bisa dikatakan membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya.

Saat ini perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang ini disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.

Mengapa dibuat Undang-Undang ini? Karena saat ini segala aktivitas manusia untuk meningkatkan taraf hidup seringkali tidak bertanggung jawab dan merusak alam. Maka Undang-Undang ini dibuat sebagai tindakan pemerintah untuk mencegah semakin rusaknya lingkungan dan untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Apa buktinya lingkungan kita rusak? Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 21, disebutkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kerusakan ekosistem dan kerusakan iklim. Yang termasuk kerusakan ekosistem adalah kerusakan tanah, terumbu karang, mangrove, gambut, dan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Sedangkan kerusakan iklim adalah kenaikan temperatur, kenaikan air laut, badai, atau kekeringan. Untuk Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan audit lingkungan hidup yang tercantum pada pasal 48 dan 49 ayat (1). Selain itu pada pasal 63, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Hal yang berkaitan dengan AMDAL dalam Undang-Undang ini diatur secara khusus pada Pasal Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, khusus yang mengatur tentang AMDAL didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur pada Paragraf Amdal, yaitu :

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 23**

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Faktanya secara hukum, bahwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup dalam penegakan hukum mengalami banyak kendala, tidak hanya dari peraturan perundangan yang saling berkait satu sama lain, oleh karena itu pemahamannya diperlukan sumber daya manusia



yang berwawasan luas terhadap substansi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, khususnya tindak pidana lingkungan dalam kaitannya dengan keberadaan AMDAL dan bagaimana cara penegakan hukumnya dalam pelaksanaan AMDAL sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan adanya tindak pidana lingkungan.

Ancaman hukuman yang ditawarkan oleh UU No 32 Tahun 2009 ini juga cukup komprehensif, misalkan mengenai pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Contoh yang paling konkret adalah porsi yang diberikan pada masalah AMDAL. Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai AMDAL, tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara UU No 32/2009 dengan UU No 23/1997, yakni hilangnya "dampak besar". Hal-hal baru mengenai AMDAL yang termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain:<sup>2</sup>

1. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
3. Komisi penilai AMDAL pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
4. AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan;
5. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :<sup>3</sup>

1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> ibid

Pendekatan hukum lingkungan dari sudut pidana ini ditentukan padanestapa atau sanksi pidana yang yang dijatuhkan oleh negara kepada warganegara yang menjadi tersangka, dan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, karena rumusan dalam ketentuan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakibatkan timbulnya kerusakan dan tercemarnya lingkungan hidup secara keseluruhannya..Dengan demikian, unsur-unsur perbuatan pidana terhadap lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Barang siapa yang secara nyata melawan hukum.
2. Karena sengaja atau karena kealpaannya.
3. **Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**
4. Perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup.
5. Perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup.
6. Mengakibatkan orang mati atau luka berat (membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain).
7. Diancam dengan pidana.Perbuatan pidana terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhkan pidana apabila syarat esensial yang berupa kesalahan, dan kesalahan itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga merupakan suatu perbuatan pidana. Di samping syarat esensial, unsur-unsur perbuatan pidana juga harus terpenuhi, sehingga dapatlah dijatuhi pidana.

Mengenai ketentuan Pidana yang terdapat dalam UU no 32 tahun 2009 telah diatur dalam Bab xv Pasal 97 – Pasal 118 UUPLH mengenai sanksi dan denda dendanya .

Kemudian jika dipetakan berbagai tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009:<sup>5</sup>

1. Setiap orang yang **melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 (ketentuan pidana)
2. Setiap orang yang **menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i UU No 32 Tahun 2009 (ketentuan pidana)
3. Pejabat pemberi izin lingkungan yang **menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 (ketentuan pidana)
4. Setiap orang yang **memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum** yang

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Pemetaan Penulis dari Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j UU No 32 Tahun 2009 (ketentuan pidana

Permasalahannya adalah jika membaca pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009

**menyatakan:**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang **wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.**

**Kemudian Pasal 37 menyatakan:**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib **menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.**
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 ayat (4)** dapat **dibatalkan apabila:**
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

**Pasal 36 ayat 4.**

- (4) **Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**

**Kemudian Pasal 69**

- (1) Setiap orang dilarang:
  - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau**
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.**

Berdasarkan Pasal tindak pidana di atas, permasalahannya adalah bagaimana jika ada kegiatan usaha menyimpan dan memperdagangkan air raksa (merkuri) berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) botol dengan berat 79,884 (tujuh puluh sembilan kilogram delapan ratus delapan puluh empat ons) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, apakah harus memiliki izin lingkungan, karena faktanya selama ini air raksa (merkuri) yang dibeli di wilayah hukum Kota Pontianak digunakan untuk penambangan tanpa izin, di Kabupaten lain (Kab Landak), karena dari tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak lagi ketentuan yang mengatur seperti rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan barang siapa yang dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sengaja memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Bagaimana penegakan hukumnya.

Demikian pula jika ada pejabat yang mengeluarkan AMDAL dan isinya tidak sesuai dengan kenyataan apakah dapat dikategorikan kepada tindak pidana lingkungan, Setiap orang yang **memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum** yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j UU No 32 Tahun 2009 (ketentuan pidana Pasal 113 Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), sedangkan pejabat tersebut memiliki sertifikasi keahlian dibidang AMDAL.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dilema permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan sudah menjadi konsekuensi yang patut untuk diangkat dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.” (Studi Kasus di Kota Pontianak)**

## **B.Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaksanaan AMDAL dalam aspek hukum Pidana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan AMDAL dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup .
2. Untuk mengetahui, memahami unsur-unsur konsep tindak pidana dalam Pelaksanaan AMDAL berdasarkan konsep hukum pidana

## **D.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat teoretis**

Adapun manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta pemahaman terhadap tindak pidana lingkungan dalam konsep hukum pidana lingkungan, khusus tindak pidana dan pertanggung jawaban pelaksanaan AMDAL yang menimbulkan masalah hukum lingkungan secara hukum pidana

### **2. Manfaat secara praktis**

Adapun manfaat praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum ketika melakukan penegakan hukum dalam hal ini penanganan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan, lebih khusus penanganan kasus pelaksanaan AMDAL .

## **Pembahasan**

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.<sup>6</sup>

Secara historis pengaturan masalah lingkungan dan tata kelola lingkungan hidup dapat ditelusuri pada tahun 1982, Indonesia menyusun undang-undang tersendiri mengenai kebijakan lingkungan hidup. Undang-undang yang mengatur hal ini ialah undang-undang no.4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 Nomor 12, TLN 3215). Sejak diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982, berbagai produk peraturan perundang-undangan resmi telah berhasil ditetapkan sebagai kebijakan yang diharapkan dapat dijadikan pegangan dalam setiap gerak dan langkah pembangunan yang di lakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan-badan usaha. Seiring dengan perkembangan, maka UU No. 4 Tahun 1982 direvisi dengan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

---

<sup>6</sup> Harun M. Husein, *Ibid*, hal 7.

Pada dasarnya, UU No 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya.

Kemudian pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan instrumen hukum yang baru guna menggantikan UU No 23 tahun 1997 mengingat berbagai perubahan situasi dan kondisi terkait permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Indonesia. Karena itulah, perbedaan yang paling mendasar dari UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan pada UU terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan **penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa *point* penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:<sup>7</sup>

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

---

<sup>7</sup>*ibid*

9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.

Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana dibagi dalam dalam delik materil maupun delik materil.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain:<sup>9</sup>

- AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
- Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
- Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan;
- Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Selain ke - 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu dikenakan sanksi pidana dan perdata terkait

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 48

<sup>9</sup> ibid

pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:<sup>10</sup>

- Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
- Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Kaitan UU No. 32 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008 Sebelum disahkannya UU No. 32 Tahun 2009, KLH sudah menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang Persyaratan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL (Permen. LH No. 11 Tahun 2008). Pada Pasal 4 Permen. LH No. 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk menyusun suatu dokumen AMDAL adalah 3 (tiga) orang dengan kualifikasi 1 orang Ketua Tim dan 2 orang Anggota Tim yang kesemuanya sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sementara amanat dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 28 adalah "Penyusun dokumen sebagaimana ... wajib memiliki sertifikat penyusun dokumen AMDAL". Jika yang dimaksud "penyusun dokumen AMDAL" pada undang-undang lingkungan yang baru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian Permen. LH No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 sudah tidak berlaku lagi. Implikasinya selanjutnya adalah masa berlakunya persyaratan tersebut harus mundur sampai ada peraturan menteri yang secara rinci mengatur tentang hal itu sesuai amanat dalam Pasal 28 Ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada KLH untuk membuat peraturan yang mengatur lebih rinci hal tersebut.

Kaitan dengan Peraturan Menteri No. 06 Tahun 2008: Sama seperti Permen. LH No. 11 Tahun 2008, ada perbedaan pengaturan yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan Permen. LH No. 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL yang berlaku efektif pada tanggal 16 Juli 2009. Dalam peraturan ini persyaratan lisensi komisi penilai diberikan kepada komisi penilai AMDAL kabupaten atau kota dan yang menerbitkan lisensi tersebut adalah instansi lingkungan hidup propinsi. Sementara dalam UU No. 32 Tahun 2009, komisi penilai AMDAL yang harus dilisensi selain komisi penilai AMDAL kabupaten atau kota, tetapi juga terhadap komisi penilai AMDAL pusat dan propinsi yang bukti lisensinya diberikan oleh masing-masing pejabatnya (Menteri, gubernur, bupati dan walikota). Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk pengawasan

---

<sup>10</sup> ibid



terhadap pemberian lisensi tersebut jika masing-masing pejabat berhak mengeluarkan bukti lisensi terhadap komisi penilainya. Maka dalam perubahan Permen No. 06 Tahun 2008, KLH harus mengetatkan persyaratan penerbitan lisensi untuk komisi penilai masing-masing daerah termasuk untuk komisi penilai penilai pusat.

Pertanyaannya adalah bagaimana jika pejabat penyusun AMDAL memberikan keterangan yang tidak tepat dengan realitas dilapangan bagaimana penegakan hukum pidananya. Permasalahannya adalah dalam Undanbg-Undang ini dokumen Amdal disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, dan dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa meminta bantuan kepada pihak lain. Penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. [pasal 26 & 27 dan pasal 28]

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." [Pasal 110]

Bagaimana Sanksi Pejabat Pemberi Izin? Berkaitan dengan Pejabat yang akan menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang akan menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan Izin Lingkungan, sebaiknya mencermati pasal 111 UU No 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa :

*(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Meski ketentuan tentang Izin Lingkungan dan ketentuan pidananya termasuk ketentuan pidana yang mengatur tentang Pejabat Pemberi Izin demikian jelas. Bahkan dinyatakan pula bahwa segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

wajib diintegrasikan ke dalam izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU No 32 Tahun 2009 ditetapkan.[pasal 123]

Namun hingga kini, ***Peraturan Pemerintah yang diamanatkan pasal 41 UU No 32 Tahun 2009 belum disahkan***. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah." [pasal 41 ].

Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka ketentuan tentang izin Lingkungan dan ketentuan pidananya termasuk ketentuan pidana yang mengatur tentang Pejabat Pemberi Izin, ***masih mengantung diawan?!***. Namun demikian tetap perlu kita cermati sambil menunggu Peraturan Pemerintahnya disahkan.

Bagaimana pula dengan ketentuan pidana, sebagaimana

### **Pasal 112**

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan pasal 71 dan pasal 72 sebagaimana dimaksud pasal 112 menyatakan:

### **Pasal 71**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

### **Pasal 72**

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan

### **Pasal 113**

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan

informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Hikmahanto Juwana**<sup>11</sup> mengemukakan bahwa sulitnya menegakkan hukum di Indonesia sudah diawali dari pembuatan peraturan perundang-undangan ini sendiri dan paradigma penegakan hukum yang belum bergeser, yaitu :

### **1. Antar Peraturan Benturan**

Pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memberi perhatian yang cukup apakah aturan yang dibuat nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar atau tidak. Pembuat peraturan perundang – undangan telah melakukan mengambil asumsi aturan yang dibuat akan dengan sendirinya dapat berjalan, tanpa melihat situasi dan kondisi kemampuan masyarakat. Sehingga timbul ungkapan peraturan atau perundang-undangan dibuat bukan untuk dipatuhi tetapi untuk dilanggar, kadang masyarakat merasa bangga apabila sudah mampu melanggar aturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan kerap dibuat secara tidak realistis. Ini sering terjadi terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan yang merupakan pesanan dari elit politik Negara Asing maupun lembaga keuangan Internasional. Disini peraturan perundang-undangan dianggap sebagai komoditas.

### **2. Masyarakat Pencari Kemenangan bukan Keadilan**

Masyarakat Indonesia terutama yang berada di kota-kota besar bila mereka berhadapan dengan proses hukum akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhiindar dari hukuman. Kenyataan ini mengindikasikan masyarakat di Indonesia sebagai masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan sebagai kemenangan, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan baik yang sah maupun yang tidak, semata-mata untuk mendapat kemenangan.

Tipologi masyarakat pencari kemenangan merupakan problem bagi penegakkan hukum, terutama bila aparat penegak hukum kurang berintegarsi dan rentan disuap, masyarakat pencari kemenangan akan memanfaatkan kekuasaan dan uang agar memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Hukum tidak akan tegak selama masyarakat mencari kemenangan.

### **3. Penegakan Hukum sebagai komoditas Politik**

Penegakan Hukum di Indonesia telah menjadi komoditas politik. Pada masa orde baru penegakkan hukum sebagai komoditas politik sangat merajalela. Penegakan hukum diatur karena kekuasaan menghendaki. Aparat penegak Hukum didikte oleh kekuasaan, bahkan diintervensi dalam menegakkan hukum.

Penegakkan hukum akan dilakukan secara tegas karena penguasa memerlukan Hukum yang sah untuk melawan kekuatan pro demokrasi atau pihak-pihak yang membela kepentingan rakyat. Tetapi penegakkan hukum akan dibuat melemah oleh kekuasaan bila pemerintah atau elite politik yang menjadi pesakitan.

---

<sup>11</sup> Hikmahanto Juwana, Ikatan hakim Indonesia, *Varia Peradilan, Majalah Hukum* tahun XXI No. 244 Maret 2006, hlmn 56

#### **4. Penegakkan hukum yang Diskriminatif dan ewuh pakewuh**

Problema lain lemahnya penegakkan hukum adalah perlakuan diskriminatif. Tersangka koruptor dan tersangka pencuri sandal akan mendapat perlakuan dan sanksi yang berbeda. Tersangka yang mempunyai status sosial yang tinggi ditengah-tengah masyarakat akan diperlakukan secara istimewa. Pengakkan hukum seolah-olah hanya berpihak pada si kaya tetapi tidak pada si miskin. Bahkan hukum berpihak pada mereka yang memiliki jabatan dan koneksi dan para pejabat hukum atau akses terhadap keadilan.

#### **5. Pengacara tahu hukum versus Pengacara Tahu hakim**

Dunia pengacarapun tidak terbebas dari masalah penegakkan Hukum . Dalam dunia pengacara menurut **Amir Syarifuddin** dapat dibedakan pengacara yang ideal dan pengacar yang nekad, dengan istilah lain bias diartikan pengacara yang tahu Hukum dan pengacara yang kenal hakim jaksa dan kepolisian.

Mengingat tipologi masyarakat di Indonesia sebagai pencari kemenangan bukan mencari keadilan, maka sudah sifatnya apabila berhadapan dengan hukum mereka lebih suka dengan pengacara yang tahu hakim (koneksi) daripada pengacara yang tahu hukum. Hal ini dikarenakan mereka ingin menang dan tidak ingin memperoleh keadilan.

#### **6. Keterbatasan Anggaran**

Penganggaran bagi infrastruktur hukum oleh Negara tidak dialokasikan secara memadai. Institusi pengadilan yang seharusnya menunjukkan kewibawaan melalui gedungnya masih banyak yang memperhatikan, bahkan dalam ukuran yang tidak sebanding dengan keangkerannya. Ruang hukum jauh dari kesan nyaman sehingga tidak memungkinkan orang mengikuti secara cermat proses persidangan.

Pengalokasian anggaran baik polisi dan jaksa dalam menangani suatu kasus jauh dari memadai. Padahal kasus yang harus dipecahkan atau dituntut sangat kompleks. Dalam kondisi keterbatasan anggaran kerap kali pihak yang melapor kejahatan justru harus mengeluarkan biaya. Tidak heran bila ada anekdot seorang yang kehilangan kambing bila melapor ke polisi hukum jadi kehilangan sapi, akibatnya masyarakat segan melaporkan sesuatu kejahatan yang terjadi, dan tidak bersedia apabila diminta jadi saksi dalam satu kasus kejahatan. Keterbatasan anggaran telah membuat penegakkan hukum lemah, tidak efektif dan kurang berwibawa.

#### **7. Penegakkan Hukum yang Dipicu oleh Media Masa**

Dalam beberapa tahun terakhir masalah penegakan hukum mendapat tempat tersendiri di berbagai media massa. Penegakan hukum yang diberitakan pun tidak yang umum-umum saja, melainkan penegakkan hukum yang melibatkan orang yang menjabat di Institusi hukum. Disadari atau tidak penegakkan hukum di Negara kita, belakangan ini telah memasuki situasi yang dipicu oleh pers. Penegakkan hukum yang disoroti pers tentu sangat positif karena penegakkan hukum akan secara serius dilakukan.

## **2..Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan**

Dalam penegakan hukum lingkungan menurut Benjamin van Rooij, ada 6 faktor penting yang menentukan proses penegakan hukum yakni:<sup>12</sup>

1. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik tingkat makro.
2. Faktor-faktor undang-undang yang berlaku
3. Faktor-faktor antar kelembagaan
4. Faktor-faktor internal kelembagaan
5. Faktor-faktor kasus terkait
6. Faktor terkait dengan lembaga individual

Berkaitan dengan faktor di atas, maka kendala Dalam Penegakan Hukum Lingkungan menurut Andi Hamzah menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia:<sup>13</sup>

1. Hambatan yang bersifat alamiah  
jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
2. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah  
kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanganan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan kerusakan lingkungan.  
Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaannya sehingga sebagai *kaderwet* belum dapat difungsikan secara maksimal. Misalnya tentang penentuan pelanggaran yang mana dapat diterapkan sebagai pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) secara perdata. Sudah ada ketentuan mengenai AMDAL, baku mutu, tetapi belum ada ketentuan tentang arti apa yang dimaksud dengan merusak atau rusak lingkungan di dalam ketentuan pidana. Begitu pula halnya dengan pengertian korporasi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan  
Para penegak hukum belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Disamping itu juga belum adanya spesialisasi penegak hukum di bidang lingkungan.
5. Masalah pembiayaan  
penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen. Perlu diketahui bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan kaidah atau norma itu.

### 3. Pelaksanaan AMDAL Di Indonesia

---

<sup>12</sup> Soeryono Soekanto, *op. cit*, hal 3

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *op. Cit*, hal. 53-55.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlu dijaga kerserasian hubungan antar berbagai kegiatan. Salah satu instrumen pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan adalah AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH. Sebagai pelaksanaan Pasal 16 UULH, pada tanggal 5 Juni 1986 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang mulai berlaku tanggal 5 Juni 1987 berdasarkan Pasal 40 PP tersebut.<sup>14</sup>

Pemerintah No. 29 Tahun 1986 dirubah dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 dan kemdian PP ini dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Dalam PP 27 tahun 1999 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu:

1. **AMDAL proyek**, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil, yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi AMDALnya ada pada Departemen Perindustrian.
2. **AMDAL Terpadu / Multisektoral**, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contoh adalah salah satu kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk penyediaan bahan bakunya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menyediakan energi, dan pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan.
3. **AMDAL Kawasan**, yaitu AMDAL yang ditujukan pada suatu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing-masing kegiatan di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDALnya karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan.
4. **AMDAL Regional**, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah. Contoh AMDAL Regional adalah pembangunan kota-kota baru.

Secara teknis instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau penyusunan AMDAL di Indonesia adalah BAPEDAL (Badan Pengendali Dampak

---

<sup>14</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University, Surabaya, 2000

Lingkungan). Sebagaimana diatur dalam PP No. 51 tahun 1993, kewenangan ini juga dilimpahkan pada instansi-instansi sektoral serta BAPEDALDA Tingkat I. dengan kata lain, BAPEDAL Pusat hanya menangani studi-studi AMDAL yang dianggap mempunyai implikasi secara nasional. Pada tahun 1999 diterbitkan lagi penyempurnaan ini adalah dengan memberikan kewenangan proses evaluasi AMDAL pada daerah. Materi baru dalam PP ini adalah diberikannya kemungkinan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan AMDAL.

Dalam sebuah lokakarya regional koordinasi tata lingkungan wilayah Kalimantan, Ir Hermien Roosita MM, Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa hanya 119 kabupaten/kota yang memiliki komisi penilai AMDAL dari 474 kabupaten/kota di Indonesia. Dari angka tersebut, hanya 50% yang berfungsi menilai AMDAL. Sementara 75% dokumen AMDAL yang dihasilkan berkualitas buruk sampai sangat buruk.<sup>15</sup>

Lebih lanjut disampaikan bahwa selama ini AMDAL memerlukan waktu proses sangat cepat, tidak ada penegakan hukum terhadap pelanggar AMDAL, kontribusi pengelolaan lingkungan yang masih rendah, menjadi beban biaya, dan dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh (oknum) aparat pemerintah, pemrakarsa atau konsultan. Lebih rusaknya, ketika AMDAL justru hanya sebagai alat retribusi, bukan sebagai bagian dari sebuah studi kelayakan, sehingga sering kali ditemui banyak AMDAL yang justru melanggar tata ruang.

Keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan (khususnya izin lingkungan) perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat oleh seorang kelompok orang (organisasi lingkungan hidup) atau badan hukum merupakan konsekuensi dari *“hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”* sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUPH<sup>16</sup>

Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:

1. Melindungi kepentingan masyarakat.

---

<sup>15</sup> [http://timpakul.hijaubiru.org/amdal/Hilangnya\\_Hak\\_Lingkungan\\_Hidup](http://timpakul.hijaubiru.org/amdal/Hilangnya_Hak_Lingkungan_Hidup). Diakses 20 Maret 2014.

<sup>16</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Keterbukaan dan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Majalah Ozon Vol 3 No.5, Januari 2002.

2. Memberdayakan masyarakat dalam mengambil keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan atau kegiatan.
4. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.<sup>17</sup>

Akan tetapi, beberapa ketentuan tentang prosedur perizinan lingkungan tidak membuka peluang bagi peran serta masyarakat, sehingga saran dan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan tentang izin yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan tidak ditampung secara prosedural.

Dokumen AMDAL (kelayakan lingkungan hidup) yang merupakan bagian dari kelayakan teknis finansial-ekonomi (Pasal 2 PP No. 27/1999) selanjutnya merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 7 PP No. 27/1999).

Dokumen AMDAL merupakan dokumen publik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektoral, lintas disiplin, dan dimungkinkan lintas teritorial administratif.

Namun, dari sisi proses, bila menilik Pasal 20 PP No. 27 Tahun 1999, maka terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dalam persetujuan AMDAL. Dalam ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Sejak dibubarkannya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, maka kemudian Kementerian Lingkungan Hidup semakin mengecil perannya dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, termasuk dalam pengawasan AMDAL di berbagai tingkatan. Terlebih lagi, pasca dikeluarkannya PP No. 25 tahun 2000, menjadikan hilangnya mekanisme koordinasi antar wilayah, yang pada akhirnya menjadikan lingkungan hidup sebagai bagian yang menjadi tidak begitu penting. Empat kelompok parameter yang terdapat di studi AMDAL, meliputi Fisik – kimia (Iklim, kualitas udara dan kebisingan; Demografi; Fisiografi; Hidro-Oceanografi; Ruang; Lahan dan Tanah; dan Hidrologi), Biologi (Flora;

---

<sup>17</sup> *Ibid*



Fauna), Sosial (Budaya; Ekonomi; Pertahanan/keamanan), dan Kesehatan masyarakat, ternyata juga masih sangat menekankan pada kepentingan formal saja. Lalu kemudian, permasalahan sosial-budaya dan posisi rakyat menjadi bagian yang dilupakan.

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengantisipasi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana juga Undang-Undang sebelumnya UU No 23 Tahun 2007 dikenal dua macam tindak pidana yaitu:<sup>18</sup>

1. Delik materi (*generic crimes*)  
Merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Perbuatan ,elwan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi sehingga delik materil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes*.
2. Delik formil (*spesific crimes*)  
Delik ini diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes*.  
Dalam UUPLH dirumuskan beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan:
  - a) kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
  - b) Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup;
  - c) Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;
  - d) Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup
  - e) Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya
  - a. Kesengajaan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan butir (e)
  - b. Kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam butir (e) dan (f) diatas.

Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang.

---

<sup>18</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, hal. 13.

Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu:<sup>19</sup>

1. penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
3. keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi;
5. gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
- 6. tuntutan pidana.**

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana tadi maka peranan atau fungsi dari UULH adalah sebagai social control, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan atau fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan berkelanjutan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pemelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal 171.

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, *op. Cit*, hal 26.

<sup>21</sup> Niniek Suparni, *op. Cit*, hal 191.

#### **4.Perbandingan UU No 23/1997 dengan UU No 32/2009 dalam penegakan hukum berkaitan dengan AMDAL**

Seperti halnya yang kita ketahui bersama,Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 (TLN No 3699) dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 dan TLN Nomor 3215.Pada dasarnya,UU No 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya.

Kemudian UU NO 23 Tahun 1997 disempurnakan dengan Undang-undang 32 tahun 2009. Jika kita substansinya UU Nomor 32 taun 2009 lihat,memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada UU No 23 Tahun 1997,sehingga jira kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada statu daerah tertentu di Indonesia (Rina Suliastini,2009:3).Selain itu pula,terkait dengan masalah otonomi daerah,undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang Sangay luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masing-masing.

.Selain itu pula seperti halnya yang dijelaskan dalam bagian penjelasan atas UU No 32 tahun 2009 pada point 8 bagian Pertama,dikatakn bahwa Undang-Undang ini juga mengatur :

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis,tata ruang,baku mutu lingkungan hidup,kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,amdal,upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,perizinan,instrumen ekonomi lingkungan hidup,peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,analisis resiko lingkungan hidup,dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi,akses partisipasi,dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penegakan hukum perdata,administrasi,dan pidana secara lebih jelas;

10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Kemudian, jika kita lihat dari penjabaran pasal per pasal maka hal-hal yang disampaikan oleh bagian penjelasan UU No 32 Tahun 2009 tersebut, akan terlihat lebih jelas dan gamblang. Diantaranya hal tersebut adalah :

1. Penerapan ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman maksimum. Pada UU No 23 tahun 1997, ketentuan pidana dimuat dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari 8 pasal, dimulai dari pasal 41 – 48. Pada pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai ancaman hukuman maksimum, ini berbeda dengan UU No 32 Tahun 2009 yang juga memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum yang tercantum pada Bab XV Ketentuan Pidana. Dengan demikian diharapkan, pada semua tindakan, usaha, dan kegiatan yang melanggar daripada Undang-undang ini diharapkan ada acuan dalam pemberian hukuman oleh hakim dan bisa menghindari berbagai bentuk putusan bebas ataupun putusan pengadilan yang tidak maksimal.
2. Perluasan alat bukti. Dari berbagai fakta sejarah yang berkembang, modus-modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan. Alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHP belum memadai mengenai berbagai pendukung alat bukti semisal contoh melalui data elektronik. Dalam berbagai contoh kasus, bentuk data elektronik seperti print out dan call data record, tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti. Sehingga UU No 32 Tahun 2009 pada pasal 96 huruf (f) mengatur mengenai alat bukti lain yang meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.
3. Penerapan asas Ultimum Remedium. Pada UU No 23 Tahun 1997 dikenal konsep asas Subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sangsi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Sedangkan pada asas ultimum remedium dikatakan bahwa mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Kaitan dengan hal ini, terlihat jelas bahwa pada UU No 23 Tahun 1997 memiliki berbagai macam rintangan guna mencapai kepada penegakan hukum secara pidana, akan tetapi hal ini di persempit ruang geraknya melalui penerapan asas Ultimum Remedium pada UU No 32 tahun 2009, sehingga diharapkan dengan

keluarnya UU No 32 Tahun 2009 ini bentuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dapat ditegakan dengan seadil-adilnya.

Bagaimanan **penerapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia?** Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1). Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

1. Bentuk dan besar nya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbitasi. Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenalkan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari :

1. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Mutlak
3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah
4. Hak Gugat Masyarakat
5. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup
6. Gugatan Administratif

## **5. Analisis Kasus Lingkungan Hidup berkaitan dengan Tindak Pidana Lingkungan**

Kasus ini berawal Kasus tindak pidana “lingkungan hidup” yang dilakukan Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal yang melanggar Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 23

Tahun 1997 sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adapun tindak pidana dimaksud dalam pasal 43 UU No 23 Tahun 1997 adalah unsurnya:

- a. Barang siapa
- b. Dengan Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Sengaja memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan berbahaya;
- d. Mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum dan nyawa orang lain.

Pembahasan unsur unsur tindak pidana Pasal 43 UU No 23 Tahun 1997;

Unsur Barang siapa:

1. Bahwa Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal mengakui menyimpan dan memperdagangkan air raksa dengan berat 79,864 dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang
2. Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal Tertangkap tangan oleh petugas dari Dis Reskrim Polda Kal-Bar sedang menyimpan dan memperdagangkan Air Raksa (Mercuri) berjumlah 141 botol dengan berat 79,864 karena tidak memiliki izin
3. Keterangan saksi Wisnanto als Asun Bin Cu Fa tong membenarkan bahwa Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal akan menjual kembali merkuri sebanyak 68 Kg kepada orang lain
4. Keterangan saksi Cong Jun Kit als Akit bahwa Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal tertangkap tangan oleh petugas Dis Reskrim Polda Kal-Bar menjual merkuri sebanyak 10 botol seberat 5.030 Gram (5,3 kg) dibeli oleh tersangka Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal dengan harga Rp 2.400.000 yang mana tersangka dalam memiliki , menyimpan dan memperdagangkan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
5. Keterangan tersangka Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal ditemukan oleh Dit Reskrim memiliki 141 botol dengan berat 79,864 di Toko Harapan Baru Jln Nusa Indah III No 39 Kel Darat Sekip Kec Pontianak Kota Kodya.

Unsur Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Unsur tersebut telah memenuhi berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B 3  
Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1) Pasal 18 Ayat (1)
2. Keterangan Ahli Drs Liwono Msi dari Bapeldalda Prov Kal-Bar, bahwa penggunaan Merkuri telah diatur dalam Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 254/MPP/Kep/2000 Tentang Tata Niaga dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertu, bahwa pihak-pihak yang akan melakukan impor dan perdagangan merkuri harus memiliki izin importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) atau izin Importoir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2).
3. Keterangan ahli Puadi SE,SH dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kal-Bar, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 254/MPP/Kep/2000, pasal 1 ayat (3), Pasal 1 Ayat (4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan berdasarkan Permendag Nomor 9/M-DAG/PER/3/2006 tentang

ketentuan dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dinyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib mendaftarkan dimaksud dalam UU No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. dan distributor resmi adalah PT.PII sebagai pemilik izin dari instansi yang berwenang.

#### Unsur Sengaja Memperdagangkan, Mengangkut, Menyimpan Bahan Berbahaya

6. Keterangan saksi AKP I Gede Sumber S, Sos Bripka Zuanda, Brigadir Garuda Pampa dan Briptu Edi Tulus W telah melakukan penangkapan Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal di di Toko Harapan Baru Jln Nusa Indah III No 39 Kel Darat Sekip Kec Pontianak Kota Kodya dan mengakui menyimpan dan memperdagangkan air raksa 141 botol dengan berat 79,864 dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
7. Keterangan saksi Ang Gek A Linda Bin Mou Cio telah terangkap tangan Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal di di Toko Harapan Baru Jln Nusa Indah III No 39 Kel Darat Sekip Kec Pontianak Kota Kodya dan mengakui menyimpan dan memperdagangkan air raksa 141 botol dengan berat 79,864 dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
8. Keterangan saksi Wisnanto als Asun Bin Cu Fa Tong, bahwa Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal pernah membeli 68 Kg kemudian air raksa tersebut tertangkap tangan.
9. Keterangan Saksi Cong Jun Kit alias Akit Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal di di Toko Harapan Baru Jln Nusa Indah III No 39 Kel Darat Sekip Kec Pontianak Kota Kodya dan mengakui menyimpan dan memperdagangkan air raksa 10 botol dengan berat 5.030 grm (5,3 Kg) dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
10. Keterangan Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal di di Toko Harapan Baru Jln Nusa Indah III No 39 Kel Darat Sekip Kec Pontianak Kota Kodya membeli air raksa 2 botol dengan berat 68 Kg mengakui menyimpan dan memperdagangkan air raksa 141 botol dengan berat 79,864 dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Unsur Mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

1. Keterangan ahli Drs Tamrin Usma Dea menjelaskan bahwa air raksa termasuk bahan berbahaya dan beracun terhadap kesehatan manusia dan lingkungan maka pengangkutan dan penggunaan serta perdagangan diatur oleh pemerintah.
2. Keterangan ahli Drs Dasrul Chaniago, MM, Msi, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No 23 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (2) PP No 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (BP3)
3. Keterangan ahli Herwindo bahwa logam merkuri (hg) yang memiliki sifat mudah menguap termasuk kategori limbah berbahaya.
4. Keterangan Drs Liwono menjelaskan merkuri termasuk kelompok bahan berbahaya dan beracun sebagaimana pada tabel 2 dalam PP No 74 Tahun 2001.
5. Keterangan Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal mengakui menyimpan dan memperdagangkan air raksa 141 botol dengan berat 79,864 dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Berdasarkan unsur tersebut, Juni Muliawan Faizal Als Aku Bin Rionoto Faizal dikenakan pasal 43 ayat (1) : barang siapa yang dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengaja memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain

Sebagaimana permasalahannya yang dikemukakan dalam latar belakang, yakni bagaimana jika ada kegiatan usaha menyimpan dan memperdagangkan air raksa (merkuri) berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) botol dengan berat 79,884 (tujuh puluh sembilan kilogram delapan ratus delapan puluh empat ons) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, apakah harus memiliki izin lingkungan, karena faktanya selama ini air raksa (merkuri) yang dibeli di wilayah hukum Kota Pontianak digunakan untuk penambangan tanpa izin, di Kabupaten lain (Kab Landak), karena dari tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak lagi ketentuan yang mengatur seperti rumusan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan barang siapa yang dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengaja memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan-bahan padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Bagaimana penegakan hukumnya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah bagaimana penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaksanaan AMDAL dalam aspek hukum Pidana ? maka permasalahan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Salah satu upaya penegakan hukum lingkungan dengan aspek administrasi adalah melalui konsep AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH dan tata laksananya oleh PP No 27 Tahun 1999. Hal ini berkaitan dengan pemberian izin terhadap pelaku usaha sampai kewenangan dalam



melakukan pengawasan yang diatur dalam Pasal 18-27 UUPH. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga mempunyai perangkat hukum tersendiri dalam pengelolaan lingkungannya. Pada umumnya pengaturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tumbuh dan berkembang setelah Konferensi Stockholm 1972.

2. Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat berkelanjutan.
3. Sebagaimana telah dievaluasi, proses AMDAL di Indonesia memiliki banyak kelemahan, diantaranya: AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam perijinan suatu rencana kegiatan pembangunan, proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selain itu juga terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL dan masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL khususnya aspek sosial budaya. Untuk mengatasi semua itu, maka Otto Soemarwoto menyarankan untuk meningkatkan efektifitas AMDAL dengan menumbuhkan pengertian di kalangan perencana dan pemrakarsa proyek akan pentingnya AMDAL, melakukan koreksi terhadap laporan AMDAL, dan rekomendasi yang diberikan haruslah jelas sehingga para perencana dapat menggunakannya. Semua itu harus didukung oleh Komisi AMDAL yang berkualitas dan berwibawa.
4. Delik unsur penyalahgunaan dan peredaran merkuri menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tidak semua terbukti, terutama unsure dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang tidak terbukti. Namun unsur tindak pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2007 telah terpenuhi tetapi bukan merupakan dasar hukum dari dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 26/PTS.Pid.B/2010/PN.BKY, menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.
5. Pemecahan permasalahan dalam menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2007 dihubungkan

dengan peredaran merkuri dalam tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang adalah bahwa aparat penegak hukum yang menangani perkara ini harus secara teliti dan tepat dalam menggunakan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan/peredaran merkuri yang masuk dalam katagori bahan berbahaya dan beracun. Hal yang sangat penting adalah bahwa aparat penegak hukum harus dapat membedakan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut masuk katagori kejahatan atau pelanggaran, sehingga mudah untuk menentukan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut.

## **B Saran-Saran**

Pengelolaan lingkungan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan antar generasi, karena mencakup multi disiplin. Untuk efektifitas AMDAL instansi lingkungan dan sektoral pemerintah harus melakukan koordinasi, berbagi informasi dan bekerja sama untuk menerapkan AMDAL dalam siklus proyek, melakukan evaluasi terhadap usaha penilaian dan perencanaan lingkungan, serta menyusun rekomendasi.

Memang, untuk menghindari jebakan ideologi pembangunan, paradigma pembangunan berwawasan lingkungan tentu lebih menarik. Sejauh paradigma ini bisa diterapkan dengan konsekuen dan dengan kesadaran yang tinggi, hasilnya akan lebih berkelanjutan. Dengan paradigma pembangunan berwawasan lingkungan, kita melestarikan ekologi dan sosial budaya masyarakat demi menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan paradigma ini, rakyat sendiri yang mengembangkan kemampuan ekonominya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Khususnya kondisi lingkungan dan sosial budaya. Dalam rangka itu, masyarakat akan lebih terdorong untuk menjaga lingkungan karena sadar bahwa kehidupan ekonomi sangat tergantung dari sejauh mana masyarakat menjaga lingkungannya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diharapkan AMDAL akan berjalan lebih efektif dari sebelumnya. Dalam PP ini dinyatakan bahwa penilaian AMDAL menjadi syarat mutlak dalam pemberian izin usaha. Dengan demikian tidak akan ada izin usaha sebelum AMDAL dianggap memenuhi syarat. Dengan masuknya pelbagai pakar terkait dari perguruan tinggi, diharapkan AMDAL bisa menjadi dokumen ilmiah yang berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Pelibatan wakil LSM dan masyarakat pun sangat penting, sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa masyarakat harus menerima dampak suatu kegiatan tanpa memiliki suara untuk menyetujui atau menolak.

Aparat penegak hukum harus teliti, cermat, dan tepat dalam menggunakan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran merkuri, yaitu dengan menggunakan ketentuan undang-undang lingkungan untuk katagori kejahatan dan menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2007 untuk katagori pelanggaran.

Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan/peredaran merkuri harus juga memperhatikan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan hidup, karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh merkuri sangat besar baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan PT. Sofmedia.
- Anonim, 2003, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Bruce Mitchell, et.al, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Daud Silalahi, 1998, *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Alumni Bandung, 2001).
- Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Unpad Press, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, yang telah dialih bahasakan oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Ilyas Asaad, 2008, *Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia*.
- I Gde Pantja Astawa dalam tulisannya, *Hubungan Fungsional Antara Hukum, Administrasi Negara dengan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanaannya*, dalam buku S.F.Marbun, et.al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Penegakan Hukum secara Umum*.
- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur.
- Kaelan M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Cetakan Keenambelas, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mas Achmad Santoso, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*, Makalah disampaikan pada *Environmental Law and Enforcement Training in Indonesia*, Indonesia-Australia Specialised Training Project (IASTP) III. Manado, 19-24 September 2005.

- \_\_\_\_\_, Topic I: *Sustainable Development, Good Governance and Environmental Law*, Manado, 19-24 September 2005.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Mertokusumo, 1996, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, PT. Armico, Bandung
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Nasution, 1998, *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*, Tarsito, Bandung.=
- N.H.T. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, 1987
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta, 1999
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Philipus Hadjon, M. et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001.
- Peter MahmudMarzuki, SH, MS, LL.M, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Indonesia, 2005.
- PramudyaSunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, 2003.
- Remmelink, 2000, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan Tristam P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1989, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, majalah Hukum nasional Nomor 1, Jakarta, BPHN.
- , Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rahardjo, Satjipto, 1989, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum*, majalah Hukum nasional Nomor 1, Jakarta, BPHN.
- , Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung, Sinar Baru.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Kota.
- Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1988, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, Cetakan Kedua.
- , dan Mamoedji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.
- Supriadi, 2008, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta
- Soebagyo Joko, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan, Rineka Cipta, 1999.
- Soleman, B, Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Siti Sundari Rangkuti, *Keterbukaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Majalah OZON Volume 3 No.5, Januari 2002.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN)*, FH. Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Suparni, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, 1994.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Tegoeh Soejono, 2006, Penegakan Hukum Demi Keadilan dan Kepastian Hukum, Termuat Dalam Buku Kapita Selekta Penegakan Hukum Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Tatiek Sri Djatmiati, dan, Philipus M Hadjon, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November, 2001.
- Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Warta Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Kompilasi II Tahun 2004, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007
- Wijoyo Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN)*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 254/MPP/KEP/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan-Bahan Tertentu.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi dan Penggunaan Merkuri Serta Bahan Sejenisnya.

### **Artikel**

<http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/penegakan-hukum-lingkungan.html> diakses pada tanggal 9 Maret 2014

AlviSyahrin, *Isu Hukum: Izin Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif* diakses pada tanggal 2 Maret 2014.

AlviSyahrin, *Izin Lingkungan dan Penerapan Sanksi Administratif Berdasarkan UUPPLH Terhadap Usaha/Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha/Kegiatan*, <http://alviprofdr.blogspot.com>.diakses pada tanggal 9 Maret 2014.

